

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan merupakan salah satu Kawasan Wisata Budaya yang menjadi pusat perkembangan dan pelestarian Budaya Betawi. Saat ini kebijakan revitalisasi telah dilakukan pihak pengelola sebagai salah satu langkah perbaikan kawasan wisata. Penerapan kebijakan revitalisasi pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya menggunakan anggaran APBD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Kebijakan revitalisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemaharuan dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan wisata baik sarana maupun prasarana. Salah satu langkah yang dapat diterapkan sebelum melakukan kegiatan revitalisasi adalah dengan melakukan evaluasi kebijakan revitalisasi rutin.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi dan observasi menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pengembangan pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Hasil revitalisasi di uji berdasarkan teori evaluasi kebijakan oleh William Dunn. Teori ini menggunakan enam indikator untuk melihat hasil suatu kebijakan yaitu:

1. Efektivitas

Pada tingkat efektivitas keberhasilan kebijakan revitalisasi Kawasan Setu Babakan berdasarkan analisis adalah “Baik”. Hal ini dikarenakan perubahan secara signifikan pada infrastruktur dan prasarana. Selain itu, dampak terhadap kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini juga diimbangi dengan jumlah pengunjung yang terus bertambah.

2. Efisiensi

Pada tingkat efisiensi bergantung pada hasil tingkat efektivitas yang telah dinilai. Bahwa tingkat efisiensi pelaksanaan kebijakan revitalisasi sudah “Kurang Baik”. Hal ini dikarenakan hasil revitalisasi belum di maksimalkan dan masih terdapat keterlambatan pembangunan revitalisasi.

3. Kecukupan

Pada tingkat kecukupan keberhasilan kebijakan revitalisasi berdasarkan analisis “Kurang Baik” dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat maupun kuantitas sarana prasarana.

4. Perataan

Pada tingkat perataan keberhasilan kebijakan revitalisasi dinilai belum maksimal atau “Kurang Baik”. Hal ini dikarenakan perataan dalam pengadaan pemberdayaan kepada pedagang dan masyarakat, sarana serta prasarana dan informasi tidak masimal.

5. Responsivitas

Pada tingkat responsivitas keberhasilan kebijakan revitalisasi berdasarkan hasil analisis adalah “Baik”. Hal ini dikarenakan inovasi kegiatan revitalisasi dengan menyediakan wadah partisipasi masyarakat dalam penilaiannya setelah berkunjung ke kawasan Setu Babakan. Resnponsif terhadap perubahan teknologi dengan menyediakan edukasi budaya Betawi.

6. Ketepatan

Pada tingkat ketepatan yang merupakan akhir dalam penilaian evaluasi kebijakan, kebijakan revitalisasi berdasarkan hasil analisis “Baik”. Perubahan perkembangan sarana dan prasarana mulai dari, teater, museum hingga kawasan wisata air. Namun, ketepatan pada setiap inovasi seperti *living museum* belum maksimal. Akibatnya, keterlambatan dalam proses pembangunan dan pemangkasan anggaran yang cukup besar.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui keenam indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan revitalisasi yang dilakukan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi berada di tengah “Menuju Baik”, dampak yang dihasilkan dalam pelestarian Budaya Betawi cukup berpengaruh. Hal ini dibuktikan melalui penetapan kawasan Setu Babakan menjadi Perkampungan Budaya Betawi dan pusat perkembangan Budaya Betawi. Namun, dalam proses revitalisasi rutin masih terdapat kekurangan dalam ketepatan inovasi yang diinginkan. Terutama dalam pengawasan

kegiatan jual beli pedagang sekitar kawasan dan edukasi Budaya Betawi yang belum secara maksimal di kelola pihak UPK PBB Setu Babakan.

Hambatan dalam proses kegiatan revitalisasi menjadi isu yang perlu dikaji dan diperbaiki dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi selanjutnya, diantaranya adalah komunikasi dan koordinasi serta kolaborasi yang perlu dilakukan pihak UPK dengan masyarakat maupun lembaga kebudayaan. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia dan anggaran dalam mengelola kawasan. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pedagang sekitar kawasan. Pembebasan lahan yang masih sulit karena adanya kepemilikan ganda. Sehingga diperlukan kajian masterplan dalam kegiatan revitalisasi selanjutnya.

4.2 Saran

Berdasarkan pada hasil analisis evaluasi dan identifikasi keberhasilan kebijakan revitalisasi Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan melalui enam indikator evaluasi Dunn. Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan tingkat efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi dengan memilah sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dalam perumusan rencana kebijakan dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pedagang, masyarakat dan lembaga kebudayaan Betawi.

Mengingat terdapat inovasi yang terlihat kurang bermanfaat bagi sasaran tujuan kebijakan.

2. Melakukan stabilitas dalam pelaksanaan operasional kegiatan pengelolaan dengan SOP kerja, dikarenakan stabilitas dan lingkungan yang kaku dan tidak fleksibel. Efisiensi yang diterapkan sebagai realisasi kebijakan revitalisasi dapat di laksanakan dalam pembangunan sarana dan prasarana dengan melakukan observasi lapangan kepada yang membutuhkan.
3. Pembenahan terkait kecukupan sarana dan prasarana, pihak Unit Pengelola Kawasan dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau stakeholders lain dalam kelengkapan sarana atau fasilitas pengunjung. Selain itu dapat berkolaborasi dengan pihak lembaga kebudayaan dalam menyediakan kebutuhan akan sejarahwan Budaya Betawi.
4. Meningkatkan kerjasama antar pegawai untuk memberluas jangkauan promosi wisata budaya dengan memanfaatkan media sosial lainnya. Pihak UPK PBB juga dapat memberikan edukasi secara *online* kepada masyarakat luas sebagai daya tarik wisata budaya. sosial media di era saat ini berkembang sangat pesat, sehingga media promosi dapat lebih ditingkatkan dengan pembuatan konten-konten video menarik. Hal ini juga berkaitan dengan luasnya jangkauan konten video yang akhir-akhir ini penggunaanya berkembang dengan pesat hingga ke mancanegara.

5. Meningkatkan kerjasama dengan UPK Badan Air dalam pelaksanaan tata kelola sekitar danau dan kebersihan. Pengembangan terhadap pembagian sub-bagian kebersihan perlu di perluas dan ditambah pegawainya.
6. Perataan terhadap kegiatan pemberdayaan kepada pedagang sekitar khususnya kuliner Betawi. Memberikan akses bebas dalam kegiatan *workshop*/pembinaan pengembangan usaha baik pedagang sekitar danau maupun UMKM kerajinan Betawi.
7. Meningkatkan tingkat responsivitas kepada pengunjung dengan memberikan tanda kawasan wisata secara jelas dan wadah aspirasi yang dapat dijangkau. Misalnya pemberian stiker berisikan barcode untuk pengisian aspirasi. Selain itu, penyelenggaraan kesenian diperlihatkan tidak hanya pada waktu libur, melainkan dapat diakses secara umum.